

ANALISIS KEKUASAAN DISKURSIF UNTUK MERESPON KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Aprilianto Satria Pratama

Peneliti Swasaba Research Initiative (SRI)

E-mail : aprilsatriapratama@mail.ugm.ac.id 087838202389

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat menemukan unsur-unsur politis dalam kebijakan penanganan COVID-19 yang disusun oleh Pemerintah. Adapun hal tersebut perlu dilakukan karena nuansa politis yang muncul dari masyarakat terhadap kebijakan penanganan COVID-19 yang disusun oleh Pemerintah masih dominan bersifat kelembagaan dan baru dikaji dari topik-topik populer seperti ekonomi, pemerintahan, virologi hingga kedokteran. Dikerjakan dengan panduan analisis kekuasaan dan wacana kritis dan dipandu pula oleh rumusan masalah "bagaimana idealitas praktik penggunaan ilmu politik untuk membaca kebijakan-kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang disusun oleh Pemerintah?", penelitian ini lantas sampai pada beberapa hasil sebagai berikut. Pertama, bahwa kekuasaan ternyata terdiri dari beberapa tingkat dan masing-masing dari tingkat kekuasaan tersebut berkaitan satu sama lain. Kedua, bahwa tingkat-tingkat kekuasaan tersebut lantas juga bisa didalami melalui analisis wacana sebagai sebuah metode penelitian alih-alih kerangka teoretik. Ketiga, bahwa tingkat-tingkat kekuasaan tersebut juga inheren dengan konsep wacana. Akhirnya, besar harapan, setelah mengetahui derajat keutuhan isu politik pada tingkat yang seharusnya, masyarakat jadi lebih mengerti posisi politiknya terhadap kebijakan penanganan COVID-19 yang disusun oleh Pemerintah.

Kata kunci : pandemi, kebijakan, kekuasaan, wacana

ABSTRACT

This study aims to make it easier for the public to find political elements in the COVID-19 handling policies drawn up by the Government. This needs to be done because the political nuances that emerge from the community regarding the COVID-19 handling policies drawn up by the Government are still predominantly institutional in nature and have only been studied from popular topics such as economics, government, virology to medicine. Working with power analysis guidelines and critical discourse and guided also by the formulation of the problem "what is the ideal of the practice of using political science to read the policies for handling the COVID-19 pandemic prepared by the Government?", this research then arrived at the following results. First, that power apparently consists of several levels and each of these levels of power is related to one another. Second, that these levels of power can then also be explored through discourse analysis as a research method rather than a theoretical framework. Third, that these levels of power are also inherent in the concept of power discourse. Hopefully, after knowing the degree of integrity of political issues at the level they should be, the public will understand more about their political position regarding the COVID-19 handling policies drawn up by the Government.

Keywords: *pandemic, policy, power, discourse*

PENDAHULUAN

Latar belakang tulisan ini adalah keperluan untuk semakin menyadarkan masyarakat -yang masih dominan mengenal politik dari informasi yang demikian sempit hanya dari sudut pandang organisasional dan topik-topik elektoral sebagaimana umumnya- bahwa sebetulnya, kebijakan-kebijakan penanganan COVID-19 perlu dikritisi secara lebih politis.

Dalam konteks politik, kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 adalah sebuah penyelenggaraan kekuasaan. Adapun kekuasaan, secara sederhana merupakan upaya/kemampuan aktor untuk memberi pengaruh baik dalam

bentuk perintah eksplisit maupun implisit kepada aktor lainnya sehingga memunculkan keuntungan di satu sisi dan kerugian di sisi lainnya. Keuntungan akan dominan dinikmati aktor yang memiliki kuasa. Sementara kerugian, yang lantas dibuktikan dengan keluhan-keluhan, akan dominan dialami aktor yang tidak memiliki kuasa.

Sementara politik adalah cabang ilmu yang lantas berangkat dari pendalaman atas kekuasaan sebagaimana disampaikan tersebut. Ia merupakan kelompok besar keilmuan yang bertugas untuk menganalisis berbagai tingkah laku kekuasaan, baik dalam rupa formal maupun informal, posisi di depan layar atau belakang layar, basis aktor individu atau kelompok hingga waktu penyelenggaraan kontinual atau *eventual*. Lowenstein, dalam Isjwara yang lantas dikutip oleh Zawawi (2015) lantas meringkas pengertian politik sebagai *nicht anderes als der kamps um die Macht* atau perjuangan menuju kekuasaan (Zawawi, 2015).

Pendek kata, politik merupakan ilmu yang bertugas untuk melakukan analisis atas berbagai upaya aktor yang diasumsikan selalu berkepentingan untuk mencapai/meraih/menjuju/mendapatkan, lalu mempertahankan/menjaga/mengawal, lalu memperbesar/mengembangkan/melipat gandakan kekuasaan secara mendalam. Konsekuensinya, politik akan senantiasa disangga oleh substansi dan metodologi dalam satu waktu. Secara substansi, politik akan dominan dimaknai sebagai ilmu/informasi/perkembangan pengetahuan yang paralel dengan kekuasaan. Jika dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan Pemerintah, substansi politik tersebut misalnya termanifestasi dalam ilmu/informasi/perkembangan pengetahuan mengenai proses *decision making*, relasi eksekutif-parlemen hingga hubungan pusat dan daerah. Sementara secara metodologi, politik akan dominan dipandang sebagai cara mengungkap realitas kekuasaan yang konon terselenggara sehari-hari dan dimanamana sebagaimana disampaikan Foucault (Syafiuddin, 2018). Ia akan melakukan analisis atas informasi-informasi politik substansial sebagaimana disampaikan sebelumnya secara lebih ilmiah. Misalnya, siapa yang sebetulnya mendapat keuntungan paling besar dari *decision making* kebijakan penanganan pandemi COVID-19? bagaimana dinamika politik eksekutif dan parlemen dalam situasi *emergency* seperti pandemi saat ini? Hingga bagaimanakah posisi politik daerah terhadap kebijakan-kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat?

Substansi dan metodologi ilmu politik tersebut lantas perlu dielaborasi, diungkap, diuji bahkan diperbarui secara ilmiah dengan aktivitas-aktivitas penelitian yang inheren dengan suatu metode penelitian tertentu. Adapun karena politik lahir dari ilmu sosial, maka melalui metode penelitian sosial pulalah substansi dan metodologi ilmu politik sebaiknya dijalankan. Apalagi karena, sebagaimana diketahui, metode penelitian sosial lantas memberi ruang dan kesempatan kepada ilmu politik untuk bisa didalami secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, politik bisa dianalisis jika lantas menghasilkan data dalam wujud statistik, baik deskriptif maupun inferensial (Zein et al., 2019). Misalnya dari hasil penyajian atas data besar (*big data analytics*) yang menyertainya. Atau bisa juga secara kualitatif, misalnya ketika politik ditilik dari hasil-hasil penelitian studi kasus, studi naratif, etnografi, fenomenologi dan *grounded theory* (Creswell, 2013).

Analisis wacana adalah salahsatu instrumen teknis yang lantas bisa digunakan untuk membaca ilmu politik tersebut, khususnya dari sudut pandang kualitatif. Menariknya, alih-alih digunakan hanya sebagai metode penelitian, analisis wacana –yang lantas disertai dengan terminologi kritis di belakangnya- juga bisa digunakan sebagai kerangka teoretik. Sebagai sebuah metode, analisis wacana lantas diposisikan secara lebih mikro sebagai

analisis *statement* yang memiliki beberapa indikator seperti fungsi, sejarah dan kuasa (Dhona, 2020). Sementara sebagai kerangka teoretik, analisis wacana merupakan hasil olah pikir para ilmuwan seperti Foucault, Norman Fairclough, Ruth Wodak hingga Teun A. Van Dijk melalui titik tekannya masing-masing. Meski demikian, demi tajamnya analisis, tulisan ini mencukupkan diri untuk memperdalam analisis wacana menurut teorisasi Foucault saja.

Selanjutnya, tulisan ini sekaligus ingin memposisikan, juga menawarkan, analisis wacana kritis Foucault sebagai instrumen bagi masyarakat untuk bisa membaca kebijakan-kebijakan pemerintah terkait COVID-19 secara lebih politis. Adapun ide tersebut muncul sebagai upaya untuk merespon beberapa situasi berikut.

Pertama, situasi ketika kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam mengatasi COVID-19 masih dominan dibaca dari sudut pandang kelembagaan/organisasional. Padahal, lembaga/organisasi hanyalah satu dari sekian banyak ekspresi dalam menyelenggarakan kekuasaan. Sebaliknya, harus diakui bahwa di balik layar, ilmu politik justru bekerja secara lebih nyata karena harus mengungkap relasi kekuasaan tanpa embel-embel formalitas.

Kedua, kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam mengatasi COVID-19 masih dominan dibaca hanya dari topik-topik populer seperti ekonomi, pemerintahan, virologi hingga kedokteran. Padahal, semua topik tersebut terjadi di dalam suatu penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan, sebagaimana diketahui, merupakan domain ilmu politik. Dampaknya, terdapat kekurang utuhan cara masyarakat dalam memahami relasi kuasa-menguasai yang terjadi dan berujung pada standardisasi sikap politik. Adapun standardisasi politik, jika tanpa dibarengi dengan kontrol ketat kepada *status quo*, berpotensi memproduksi negara yang anti terhadap kritik.

Oleh karenanya, dipandu oleh rumusan masalah “bagaimana idealitas praktik penggunaan ilmu politik untuk membaca kebijakan-kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang disusun oleh Pemerintah?”, tulisan ini berkepentingan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa mestinya, ilmu politik bisa dipandang dari sudut pandang keilmuan yang lebih utuh.

Tinjauan Pustaka

Intisari tulisan ini terletak pada analisis kekuasaan diskursif yang terjadi melalui wacana kebijakan penanganan COVID-19. Namun demikian, jika dibedah, sebenarnya intisari tersebut terdiri dari dua topik besar, yaitu analisis wacana di satu sisi dan kekuasaan di sisi lainnya. Tinjauan pustaka lantas dilakukan untuk memeriksa perkembangan *literature* dari 2 (dua) topik besar tersebut.

Pertama, mengenai kajian-kajian yang berkaitan dengan analisis wacana. Faktanya, analisis wacana masih dominan ditempatkan sebagai topik yang inheren dengan pola pikir *original* dari para pencetusnya. Misalnya, tulisan yang mengelaborasi teks, praktik diskursif dan praktik sosial Fairclough yang ditulis oleh Munfarida (Munfarida, 2014). Juga studi mengenai penggunaan analisis wacana Teun A Van Dijk dalam harian *Republika* yang ditulis oleh Humaira (Humaira, 2018). Analisis wacana, dengan demikian, masih dijelaskan dalam konteks yang demikian mikro. *Kedua*, berkaitan dengan kekuasaan. Faktanya, kekuasaan masih dominan dijelaskan secara terpisah antara satu konsep dan lainnya. Seolah-olah, konsep kekuasaan satu dan lainnya tidak terhubung. Misalnya seperti

kekuasaan Foucault yang dijelaskan dominan dari ranah sosiologi politik sebagaimana ditulis oleh Mudhoffir (Mudhoffir, 2013).

Pada akhirnya, kritik atas penelitian mengenai analisis wacana dan kekuasaan dititik beratkan pada beberapa hal berikut. *Pertama*, seolah-olah analisis wacana hanya bisa dijelaskan dalam versinya masing-masing. *Kedua*, begitu pula dengan kekuasaan, yang seolah-olah hanya bisa dijelaskan melalui pendekatan tunggal. Sebaliknya, tulisan ini justru ingin mengisi *literature gap* dengan menempatkan analisis wacana dan analisis kekuasaan secara baru. *Pertama*, bahwa penelitian ini justru ingin mengatakan bahwa analisis wacana bisa dikaitkan dengan konsep politik lain. Misalnya, analisis wacana yang bisa dikaitkan dengan konsep kekuasaan itu sendiri. *Kedua*, bahwa penelitian ini juga ingin mengatakan bahwa kekuasaan itu sendiri justru terkait dengan konsep-konsep lainnya. Misalnya, *one dimentional of power* yang lantas dikaitkan dengan *two dimentional of power* dan *three faces of power*.

Selanjutnya, selain dari perspektif wacana dan perspektif kekuasaan, tulisan ini juga perlu bertumpu pada penanganan COVID-19 itu sendiri. Hal ini untuk semakin membuktikan bahwa selama ini, penanganan COVID-19 masih dominan dilihat dari sudut pandang selain politik.

Misalnya dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Yamali dan Putri yang membahas terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi. Di dalamnya, kedua peneliti banyak menyoroti penurunan tersebut dari indikator-indikator seperti inflasi, penurunan okupansi pada sektor turisme dan penurunan impor. Dengan demikian, secara umum, kedua peneliti berupaya untuk membedah penanganan COVID-19 dari urusan-urusan keekonomian (Yamali & Putri, 2020).

Selain itu, terdapat pula penelitian dari Benuf yang menyoroti kekosongan hukum sebagai akibat dari belum adanya perlindungan kepada konsumen *peer to peer lending*. Uniknya, kekosongan hukum tersebut justru terjadi ketika Pemerintah sedang berupaya untuk mempercepat penyelenggaraan stimulus ekonomi (Benuf, 2020).

METODE

Non positivistik dan positivistik adalah cara berpikir yang pertama-tama mesti digunakan untuk menyelidiki ilmu-ilmu politik. Non-positivistik mengakomodasi penyelenggaraan subjektivitas dalam memperlakukan data sementara positivistik adalah cara mendefinisikan derajat keilmiahannya sebuah penelitian hanya dari objektivitasnya.

Meski demikian, tulisan ini cenderung untuk menggunakan cara berpikir non-positivistik setidaknya untuk 3 (tiga) alasan. *Pertama*, bahwa kekuasaan, sebagai intisari dari ilmu politik, terjadi bahkan dalam unit kehidupan paling kecil. Foucault misalnya, menyampaikan bahwa "... *power is co extensive with social body*". Oleh karenanya, subjektivitas akan jadi inheren dengan sendirinya ketika kajian yang dilakukan merujuk pada ilmu politik. *Kedua*, bahwa, masih menurut Foucault, kekuasaan tidak akan pernah lepas dari relasi antar aktor (Gordon et al., 1980). Subjektivitas, dengan demikian, benar-benar menjadi pokok penelitian. Dan *ketiga*, karena kekuasaan tidak pernah bebas nilai. Kekuasaan adalah manifestasi dari ide-ide ideologis.

Analisis wacana kritis lantas menjadi metode yang coba digaungkan oleh tulisan ini. Analisis wacana merupakan metode yang merujuk pada keyakinan bahwa segala interaksi, baik yang disampaikan dalam teks, konteks maupun sistem di dunia ini tidak akan lepas

dari nilai-nilai ideologis (Munfarida, 2014). Pendek kata, alih-alih bebas nilai, analisis wacana kritis justru menunjukkan bahwa betapa komunikasi sehari-hari merupakan instrumen percobaan peralihan sekaligus perebutan kekuasaan.

Bagian ini lantas digunakan untuk kembali menekankan bahwa basis analisis wacana adalah wacana kritis atas penyelenggaraan kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan didalami melalui analisis kekuasaan sementara wacana didalami melalui analisis *statement*. Adapun elaborasinya adalah sebagai berikut.

Pertama, penggunaan analisis kekuasaan. Teknisnya, eksistensi kekuasaan lantas coba dideteksi dengan menguji efektivitas dari indikator-indikator berikut; perintah, aktor dan timbal balik. Adapun masih secara teknis, pencarian data dilakukan dengan menganalisis perintah, aktor dan timbal balik tersebut ke dalam penyelenggaraan kebijakan-kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang secara umum telah dilakukan oleh Pemerintah.

Kedua, penggunaan analisis *statement*. Foucault dalam Dhona (2020) lantas menyampaikan bahwa wacana bisa dianalisis melalui *statement*. Adapun *statement* merupakan satuan terkecil wacana yang lantas terbagi lagi ke dalam fungsi, sejarah dan kuasa. Di dalam fungsi, terdapat analisis subjek, objek, fungsi dan strategi. Subjek merujuk pada sumber wacana. Objek merujuk pada pihak yang diberi wacana. Fungsi merujuk pada muatan wacana yang digunakan. Sementara strategi merujuk pada seluruh upaya untuk menyelenggarakannya. Di dalam sejarah, terdapat keteraturan dan ketidak teraturan. Sementara di dalam kuasa, terdapat lokasi kekuasaan yang lokal dan bentuk kekuasaan yang relasional (Dhona, 2020).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam konteks wacana, data dikumpulkan melalui beberapa tindakan sebagai berikut. *Pertama*, melalui observasi dan pembacaan secara seksama, mengenai kebijakan-kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hal ini, biasanya, penanganan COVID-19 masih dilihat dari aspek-aspek yang *visible*, seperti ekonomi, hukum, kesehatan hingga pariwisata. Hingga akhirnya, muncul data-data yang masih berada di permukaan sehingga baru bisa “dikomentari” saja, seperti : “bagaimana dampaknya baik secara ekonomi, hukum, kesehatan hingga pariwisata tersebut?”

Kedua, selanjutnya, data dikumpulkan melalui pembacaan atas situasi yang terjadi secara lebih mendalam. Dalam tahap ini, peneliti diharapkan mulai menemukan kejanggalan-kejanggalan atas situasi yang terjadi dan mulai berasumsi bahwa kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah bukanlah sebuah tindakan netral. Dampaknya, data akan muncul secara lebih politis.

Pada akhirnya, data akan dikumpulkan dalam bentuk-bentuk diskursif seperti berita, peraturan perundangan, pernyataan pakar, usulan kementerian hingga aspirasi masyarakat. Hanya saja, jenisnya akan berbeda sesuai tahapnya. Pada tahap pertama, data-data wacana akan muncul secara non politis. Sementara yang kedua akan muncul secara lebih politis.

Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh tersebut, lantas dianalisis secara bertingkat dengan menggunakan analisis fungsi, sejarah dan kuasa yang biasa diringkas dalam analisis *statement* (Dhona, 2020). Analisis fungsi akan terbagi kembali ke dalam analisis subjek, objek, konsep dan strategi. Analisis sejarah akan menyorot keteraturan dan ketidak aturan wacana yang

terselenggara. Sementara analisis kuasa akan mendokumentasikan tingkatnya yang lokal/regional dan atau bentuknya yang relasional/formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pertama, bahwa penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah bisa dikaji dari bentuk kekuasaan yang tidak sama antara satu dan lainnya (beragam). Dan tidak cukup sampai di situ, faktanya, kekuasaan tidak selalu bisa pula dijelaskan dari tingkat yang sama. Konsep kekuasaan yang sesuai, dengan demikian, merujuk pada teorisasi kekuasaan yang masing-masing disampaikan oleh Robert Dahl, Bachrach-Baratz dan Steven Lukes. Adapun operasionalisasinya tersaji sebagai berikut :

Tabel 1. Pembedahan Kebijakan Penanganan COVID-19

No	Bentuk Kekuasaan	Indikator		
		Perintah	Aktor	Timbal Balik Objek
1	Tingkat pertama	Bentuknya arahan Pusat	Presiden, Satgas COVID-19, KPC-PEN	Patuh karena hukum
2	Tingkat kedua	Bentuknya peraturan yang berubah-ubah	Industri medis, industri digital	Patuh karena isu
3	Tingkat ketiga	Tidak terlihat	WHO, PBB	Patuh karena nilai

Tabel 2. Kerangka kekuasaan dari Kebijakan Penanganan COVID-19

No	Bentuk Kekuasaan	Indikator		
		Perintah	Aktor	Timbal Balik
1	Tingkat pertama	Konkret	Konkret	Langsung
2	Tingkat kedua	Konkret dan tertutup	Balik layar	Tidak langsung
3	Tingkat ketiga	Tidak terlihat	Hampir tidak ada	Tidak ada

Kedua, bahwa analisis wacana juga bisa dilakukan untuk mendalami penanganan COVID-19 oleh Pemerintah. Adapun secara operasional, elemen-elemen di dalamnya tersaji sebagai berikut :

Tabel 3. Analisis Fungsi (Realitas dan Kerangka Kebijakan)

No	Bentuk Kekuasaan	Indikator	
		Perintah	Aktor
1	Subjek	Dalam bentuk koordinasi internal pemerintah	Otoritas Pemerintah
2	Objek	Dalam bentuk PSBB/PPKM	Masyarakat

3	Konsep	Dalam bentuk pembatasan mobilitas	-
4	Strategi	Dalam bentuk penerahan otoritas hukum	-

Tabel 4. Analisis Sejarah (Realitas dan Kerangka Kebijakan)

No	Bentuk Kekuasaan	Indikator	
		Perintah	Aktor
1	Keteraturan	Penyempurnaan kebijakan	Otoritas Pusat
2	Ketidak aturan	Inkonsistensi kebijakan, tidak sinkronnya implementasi kebijakan	<i>Stakeholder</i> lainnya

Tabel 5. Analisis Kuasa (Realitas dan Kerangka Kebijakan)

No	Bentuk Kekuasaan	Indikator	
		Perintah	Aktor
1	Lokal/Regional	PSBB/PPKM	Otoritas Pemerintah
2	Relasional	Menggunakan masker, menjaga jarak	Seluruh aktor yang berkepentingan

Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis-analisis yang dilakukan tersebut bertujuan untuk membedah, kalau belum cukup untuk dikatakan bertujuan untuk membuktikan, wacana penanganan COVID-19 di Indonesia yang ternyata juga memproduksi sisi politis alih-alih hanya sisi formal yang tampak di permukaan. Adapun analisis tersebut lantas perlu dibahas dalam, setidaknya, 2 (dua) tingkat berikut ini.

Pertama, bahwa kekuasaan yang terdiri dari beberapa tingkat tersebut ternyata berkaitan satu sama lain. Di tingkat pertama misalnya, kekuasaan bisa dilihat dari sudut pandang perintah. Adapun pengertian sederhana mengenai kekuasaan tingkat pertama ini merujuk pada konsepsi Robert Dahl yang mengatakan bahwa kekuasaan adalah proses transfer pengaruh dari aktor A ke aktor B sehingga aktor B akan melakukan semua yang A minta tersebut tanpa melakukan perlawanan (Agussalim, 1998).

Selanjutnya, di tingkat kedua, kekuasaan bisa dimaknai sebagai upaya-upaya untuk menghalangi naiknya isu yang berlawanan dengan kepentingan pemilik kuasa untuk naik ke permukaan. Sementara di tingkat ketiga, kekuasaan bisa dimaknai sebagai bekerjanya nilai-nilai ideologis, yang bahkan telah menjadi norma, sehingga objek yang dikuasai akan melakukan perintah-perintah yang diberikan tanpa merasa terkekang karena keluhannya akan tercegah untuk muncul dengan sendirinya (Townshend, 2007).

Kedua, bahwa tingkat-tingkat kekuasaan tersebut lantas juga bisa dibedah melalui analisis wacana yang sedang diposisikan sebagai sebuah metode penelitian. Adapun sebagaimana tersaji dalam tabel 4,5 dan 6, hasilnya menunjukkan bahwa :

- a. Dilihat dari fungsinya, memang terjadi tindakan-tindakan politis berbasis wacana yang melibatkan relasi kuasa-menguasai antara otoritas pemerintah dan

- masyarakat serta memang terjadi pula tindakan-tindakan politis berbasis wacana yang dikerangkai oleh subjek, objek, konsep dan strateginya.
- b. Dilihat dari sejarahnya, memang terjadi tindakan-tindakan politis berbasis wacana yang melibatkan inkonsistensi pemerintah tetapi sekaligus upaya untuk terus memperbaiki kebijakan-kebijakan penanganan COVID-19.
 - c. Dilihat dari kuasanya, memang terjadi tindakan-tindakan politis berbasis wacana yang menunjukkan derajat intimasi tinggi antar aktor karena terjadi secara relasional dan sekaligus pula menunjukkan lingkup kebijakan yang terjadi secara lokal-regional.

Ketiga, bahwa tingkat-tingkat kekuasaan tersebut inheren dengan konsep wacana yang tidak netral. Wacana, sebagai konsep yang menekankan eksistensi nilai-nilai ideologis dalam teks, konteks dan sistem, tidak akan bisa begitu saja dipisahkan dari ide dan praktik penyelenggaraan kekuasaan. Sebaliknya, kedua konsep tersebut justru menunjukkan relasi yang demikian paralel.

KESIMPULAN

Sebagai sebuah ilmu, politik perlu disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk yang semurni-murninya. Melalui pembaruan cara melihat ilmu politik, khususnya setelah dibantu dengan analisis wacana, kebijakan-kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah jadi terlihat lebih utuh. Pendidikan politik berbasis penelitian di Indonesia, dengan demikian, perlu diperkuat, atau bahkan mungkin direformasi, sehingga mampu menghadirkan relasi kuasa menguasai negara-masyarakat yang berkualitas.

Penelitian ini, dengan demikian mampu menjawab rumusan masalahnya yang tersaji dalam pertanyaan “bagaimana idealitas praktik penggunaan ilmu politik untuk membaca kebijakan-kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang disusun oleh Pemerintah?”. Yaitu, pertama, bahwa kekuasaan ternyata terdiri dari beberapa tingkat dan masing-masing dari tingkat kekuasaan tersebut berkaitan satu sama lain. Kedua, bahwa tingkat-tingkat kekuasaan tersebut lantas juga bisa didalami melalui analisis wacana sebagai sebuah metode penelitian alih-alih kerangka teoretik. Ketiga, bahwa tingkat-tingkat kekuasaan tersebut juga inheren dengan konsep wacana yang ternyata tidak netral.

RUJUKAN

- Agussalim, D. (1998). Menelusuri Perdebatan Mengenai Konsep Kekuasaan. *Jurnal Sosial Politik, 1* No 3, 11–29.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches - Third Edition* (L. Habib, K. Koscielak, B. Bauhaus, M. Masson, C. Digitalis (P) Ltd, S. Irwin, D. Publication Services Inc., R. Storey, N. Elliott, & A. Hutchinson (eds.); 3rd ed.). Vicki Knight.
- Dhona, H. R. (2020). Using Foucauldian Discourse Analysis in Communication Studies. *Communication Spectrum, 9*(2020), 189–208.
- Gordon, C., Marshall, L. E. O., Mephram, J., & Soper, K. (1980). *Power/Knowledge, Selected Interviews & Other Writings 1972-1977*. Harvester Press, Limited.
- Humaira, H. W. (2018). Analisis Wacana Kritis (AWK) Model Teun A. Van Dijk pada Pemberitaan Surat Kabar Republika. *Literasi, 2*(1), 32–40.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/literasi/article/view/951>

- Benuf, K. (2020). Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. 9(2). 203-217.
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 18(1).
<https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3734>
- Munfarida, E. (2014). Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough. *Komunika*, 8(No 1), 1–19.
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault). *Refleksi : Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18(2), 141–155.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ref.2018.1802-02>
- Townshend, J. (2007). Power, A Radical View. *Contemporary Political Theory*, 6(3), 372–374.
<https://doi.org/10.1057/palgrave.cpt.9300291>
- Yamali, FR., & Putri, RN. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis : Journal of Economics and Business* 4(2) 384-388.
- Zawawi, A. (2015). Politik Dalam Pandangan Islam. *Ummul Quro*, 5(Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015), 85–100.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Zein, S., Yasyifa, L., Ghozi, R., Harahap, E., Badruzzaman, F., & Darmawan, D. (2019). Pengolahan dan Analisis Data Kuantitatif Menggunakan Aplikasi SPSS. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 1–7.